

RANCANGAN AKHIR (RANHIR) RENCANA KERJA 2025





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. AP. Mangkunegoro Tenggarong Telp. (0541) 661009 – 113 Fax 661009
Web Site : <http://bpbd.kutaikartanegarakab.go.id/>
Email : bpbd.kab.kutaikartanegara@gmail.com
T E N G G A R O N G

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Nomor : P. 199/BPBD/UMTAK/100.3/03/2024

TENTANG

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026 telah ditetapkan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, maka Rancangan Akhir RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati No 21 tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025 .

Pasal 1

Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, selanjutnya disebut dengan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan untuk Tahun Anggaran 2025.

Pasal 2

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 21 April 2024

Kepala Pelaksana,



SETIANTO NUGROHO AJI, SH, M, Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671027 199403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. AP. Mangkunegoro Tenggarong Telp. (0541) 661009 – 113 Fax 661009
Web Site : <http://bpbdkutai.kartanegara.kab.go.id/>
Email : bpbdkab.kutai.kartanegara@gmail.com
T E N G G A R O N G

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
Nomor : P. 189/BPBD/UMTAK/100.3/03/2024

TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2026 telah ditetapkan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, Tim Penyusun Rancangan Awal RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati No 21 tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Awal RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kutai Kartanegara sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025;
 - b. mengkaji dan meneliti bahan dan data yang disajikan untuk penyusunan Rancangan Awal RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025;
 - c. melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Rancangan Awal RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025;
 - d. merumuskan kebijakan guna kelancaran penyusunan Rancangan Awal RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kutai Kartanegara;

- e. melaksanakan penyusunan Rancangan Awal RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rancangan Awal RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025;
- g. melaporkan hasilnya pada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kutai Kartanegara selaku Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 1 Maret 2024

Kepala Pelaksana,


SETIANTO NUGROHO AJI, SH, M, Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

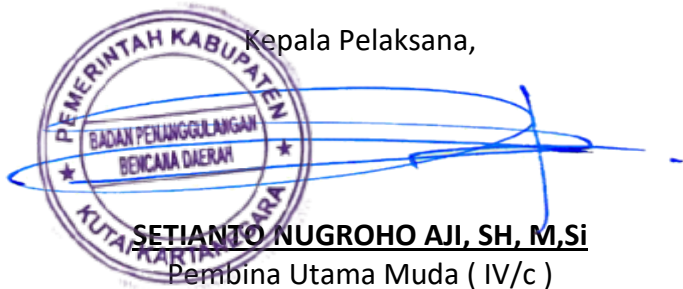
NIP. 19671027 199403 1 008

Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kutai Kartanegara
Nomor : P.189 /BPBD/UMTAK/100.3/03/2024
Tanggal : 1 Maret 2024
Perihal : Tentang Penetapan Tim Penyusun Rancangan Awal RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2025

1. Pengarah : Kepala Pelaksana BPBD
2. Penanggung Jawab : Sekretaris
3. Ketua : Kasubbag Keuangan dan Aset
4. Sekretaris : Noor Ramsyah, SE
5. Anggota :
 1. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 2. Kabid Kedaruratan
 3. Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 4. Kasubbag Umum dan Tatalaksana Kepegawaian
 5. Kasubbid Pencegahan
 6. Kasubbid Logistik
 7. Kasubbid Rehabilitasi

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 1 Maret 2024

Kepala Pelaksana,



SETIANTO NUGROHO AJI, SH, M, Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671027 199403 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita sehingga Penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dimaksudkan untuk meletakkan landasan bagi sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu menjamin arah pembangunan dan memiliki akuntabilitas kinerja yang terukur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran dan kritik yang konstruktif sangat kami harapkan,

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah turut memberikan bantuan kepada kami sehingga Penyusunan Rancangan Akhir (Ranhir) Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kepala Pelaksana,



SETIANTO NUGROHO AJI, SH, M.Si
Pemuda Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671027 199403 1 008



DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul

Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kab. Kutai Kartanegara Tentang Tim Penyusun i

Kata Pengantar v

Daftar Isi vi

Bab I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang1

1.2. Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 5

1.4. Sistematika Penulisan 5

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 18

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ...20

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD 22

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat34

Bab III. Tujuan dan Sasaran

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 37

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah40

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan 43



Bab V.	Penutup	58
5.1.	Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian	58
5.2.	Kaidah-kaidah Pelaksanaan	58
5.3.	Rencana Tindak Lanjut	59

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi pada Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya melalui pendekatan kinerja, pemerintah daerah fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja.

Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi.

Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah terkelompokkan hingga sub kegiatan akan memudahkan stakeholders untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Dalam rangka tertib perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah dimaksud, perlu disusun pedoman klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah bagi pemerintah daerah secara elektronik dengan dukungan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Dengan demikian diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam mengintegrasikan dan menyelaraskan proses bisnis pelayanan publik pemerintah daerah terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah



merupakan peraturan turunan dari Undang-undang No 23 tahun 2014. Permendagri ini diterbitkan untuk mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diatur berdasarkan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan diimplementasikan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Menindaklanjuti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/763/SJ tanggal 27 Januari 2020 perihal Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, seluruh OPD di pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pemetaan terhadap Program dan Kegiatan pada RPJMD yang masih berlaku dengan mempedomani Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah maka pelaksanaan pembangunan tahun Kedua RPJMD 2021-2026 yang berlandaskan pada Visi Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yakni :

“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”

Sebagai langkah upaya penyempurnaan matrik struktur program dan kegiatan melalui penetapan indikator kinerja. Hasil dari penyusunan ini akan diimplementasikan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1137); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4723);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2014, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4828)



11. Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4829);
12. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 No. 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4830);
13. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Mendagri Nomor 12 tahun 2006 tentang kewaspadaan dini masyarakat di daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
16. Peraturan Mendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi Rencana kerja pemerintah daerah tahun 2017;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005 - 2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara;



25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dimaksudkan untuk meletakkan landasan bagi sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu menjamin arah pembangunan dan memiliki akuntabilitas kinerja yang terukur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan program dan kegiatan yang akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 ;
2. Meletakkan prinsip dasar dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara terkoordinasi, terpadu dan tepat waktu serta sasaran yang di inginkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang



- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap rancangan Akhir RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Bab V Penutup

- 5.1. Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian
- 5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut

Lampiran - lampiran



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 , disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari yang direncanakan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan, untuk menjamin setiap alokasi anggaran untuk membiayai proses pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah (RPJMD), dilaksanakan oleh OPD yang berkompeten dan bertanggungjawab dalam proses pencapaiannya

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) tahun n-2 dan Capaian Renstra Tahun 2023 :



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

Tabel. T-C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2023
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6		7		8		9		10			
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
-																		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			91,847,604,876		38,371,178,639		27,134,005,652		-				40,568,496,589				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2,250,000,000		864,526,200		450,000,000		-				864,526,200				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35	1,000,000,000	14	396,742,400	7	200,000,000			0.00%	0.00%	14.00	396,742,400	40.00%	39.67 %	BPBD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	500,000,000	24	184,159,300	12	100,000,000			0.00%	0.00%	24.00	184,159,300	40.00%	36.83 %	BPBD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	25	750,000,000	5	283,624,500	2	150,000,000			0.00%	0.00%	5.00	283,624,500	20.00%	37.82 %	BPBD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			48,282,940,126		22,713,785,589		13,546,694,126	-	-	-	-	-	22,713,785,589	-	-	-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	5,280	46,082,940,126	2470.00	21,841,109,819		13,125,745,126			0.00%	0.00%	2470.00	21,841,109,819	46.78%	47.40 %	BPBD	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	70	400,000,000	21.00	159,861,500		86,000,000			0.00%	0.00%	21.00	159,861,500	30.00%	39.97 %	BPBD	



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
			4		5		6		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
2	3	4	5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	60	1,800,000,000	32.00	712,814,270		334,949,000			0.00%	0.00%	32.00	712,814,270	53.33%	39.60 %	BPBD	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah			850,000,000		-		150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	450	850,000,000	0.00	-		150,000,000			0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	BPBD	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			1,990,000,000		362,963,900		138,025,000	-	-	-	-	-	362,963,900	-	-	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atributnya	450	850,000,000	550.00	192,590,900					0.00%	0.00%	550.00	192,590,900	122.22 %	22.66 %	BPBD	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	450	550,000,000	0.00	-		72,025,000			0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	BPBD	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	290,000,000	250.00	170,373,000		66,000,000			0.00%	0.00%	250.00	170,373,000	83.33%	58.75 %	BPBD	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	300,000,000	0.00	-					0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	BPBD	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			4,577,500,000		1,861,572,401		834,040,000	-	-	-	-	-	1,861,572,401	-	-	-	



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
2	3	4	4		5		6		7		8		9		10			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	500	52,500,000	200.00	20,977,000		10,500,000			0.00%	0.00%	200.00	20,977,000	40.00%	39.96 %	BPBD	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	8,500	550,000,000	5700.00	264,242,770		173,540,000			0.00%	0.00%	5700.00	264,242,770	67.06%	48.04 %	BPBD	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	600	310,000,000	120.00	49,840,000		-			0.00%	0.00%	120.00	49,840,000	20.00%	16.08 %	BPBD	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	14,450	475,000,000	4850.00	167,091,000		100,000,000			0.00%	0.00%	4850.00	167,091,000	33.56%	35.18 %	BPBD	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	37,500	425,000,000	10500.00	104,908,000		50,000,000			0.00%	0.00%	10500.00	104,908,000	28.00%	24.68 %	BPBD	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,950	290,000,000	0.00	-		-			0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	BPBD	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175	1,650,000,000	86.00	1,063,307,557		350,000,000			0.00%	0.00%	86.00	1,063,307,557	49.14%	64.44 %	BPBD	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500	475,000,000	225.00	115,346,074		75,000,000			0.00%	0.00%	225.00	115,346,074	45.00%	24.28 %	BPBD	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	60	350,000,000	24.00	75,860,000		75,000,000			0.00%	0.00%	24.00	75,860,000	40.00%	21.67 %	BPBD	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7,000,000,000		1,838,697,137		6,025,000,000	-	-	-	-	-	4,036,015,087	-	-	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya	360	10,500,000,000	75.00	2,197,317,950		-		-	0.00%	0.00%	75.00	2,197,317,950	20.83%	20.93 %	BPBD	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	360	600,000,000	0.00	-		-		-	0.00%	0.00%	0.00	-	0.00%	0.00%	BPBD	



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
2	3	4	4		5		6		7		8		9		10			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pengadaan Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Gedung	7	3,500,000,000	3.00	1,385,484,007	-	-	-	-	0.00%	0.00%	3.00	1,385,484,007	42.86%	39.59%	BPBD	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1,285	2,900,000,000	61.00	453,213,130	6,025,000,000	-	-	-	0.00%	0.00%	61.00	453,213,130	4.75%	15.63%	BPBD	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20,817,164,750		8,378,358,023	4,302,915,806	-	-	-	-	-	-	8,378,358,023	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	4,950	35,000,000	65.00	4,940,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	65.00	4,940,000	1.31%	14.11%	BPBD	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	720	1,330,000,000	156.00	445,224,369	300,000,000	-	-	-	0.00%	0.00%	156.00	445,224,369	21.67%	33.48%	BPBD	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	13,020	19,452,164,750	2616.00	7,928,193,654	4,002,915,806	-	-	-	0.00%	0.00%	2616.00	7,928,193,654	20.09%	40.76%	BPBD	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6,080,000,000		2,351,275,389	1,687,330,720	-	-	-	-	-	-	2,351,275,389	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	440	3,200,000,000	154.00	1,850,765,589	1,272,860,000	-	-	-	0.00%	0.00%	154.00	1,850,765,589	35.00%	57.84%	BPBD	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	300	440,000,000	95.00	179,400,000	75,000,000	-	-	-	0.00%	0.00%	95.00	179,400,000	31.67%	40.77%		



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penang gung jawab	Ket	
			4		5		6		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%				
2	3	4	5		6		7		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp											
	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	10	2,440,000,000	4.00	321,109,800		339,470,720			0.00%	0.00%	4.00	321,109,800	40.00%	13.16 %			
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			39,825,297,588		13,257,472,650		4,099,895,550		-				13,257,472,650					
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			3,255,000,000	86	595,789,761	85	1,000,000,000	65	-	76.47 %	0.00%	151.00	595,789,761		18.30 %	BPBD		
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	1,500	3,255,000,000	187.00	595,789,761		1,000,000,000			0.00%	0.00%	187.00	595,789,761	12.47%	18.30 %	BPBD		
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			11,780,148,794		5,469,807,722		1,499,895,550	-	-	0.00 %	0.00%	0.00	5,469,807,722		46.43 %	BPBD		
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	750	2,400,000,000	150.00	223,172,000		650,000,000			0.00%	0.00%	150.00	223,172,000	20.00%	9.30%	BPBD		
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	220	1,987,574,397	87.00	2,247,812,397		149,999,750			0.00%	0.00%	87.00	2,247,812,397	39.55%	113.09 %	BPBD		



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
2	3	4	4		5		6		7		8		9		10			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	850	2,255,000,000	202.00	187,500,000		149,895,800			0.00%	0.00%	202.00	187,500,000	23.76%	8.31%	BPBD	
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	25	1,750,000,000	8.00	282,206,648		150,000,000			0.00%	0.00%	8.00	282,206,648	32.00%	16.13 %	BPBD	
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penanganan Pasca Bencana Kab/Kota melalui pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	160	400,000,000	5.00	97,404,000		150,000,000			0.00%	0.00%	5.00	97,404,000	3.13%	24.35 %	BPBD	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi	10	2,987,574,397	87.00	2,431,712,677		250,000,000			0.00%	0.00%	87.00	2,431,712,677	870.00 %	81.39 %	BPBD	
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			12,642,574,397		3,722,153,047		1,100,000,000		-	0.00 %	0.00%	0.00	3,722,153,047		29.44 %	BPBD	
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	5	250,000,000	3.00	100,000,000		100,000,000			0.00%	0.00%	3.00	100,000,000	60.00%	40.00 %	BPBD	
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	160	600,000,000	1.00	148,673,020		150,000,000			0.00%	0.00%	1.00	148,673,020	0.63%	24.78 %	BPBD	



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
2	3	4	4		5		6		7		8		9		10			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	220	6,987,574,397	204.00	2,595,630,237		400,000,000			0.00%	0.00%	204.00	2,595,630,237	92.73%	37.15 %	BPBD	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	70	3,255,000,000	89.00	608,519,740		250,000,000			0.00%	0.00%	89.00	608,519,740	127.14 %	18.69 %	BPBD	
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	5	1,150,000,000	3.00	197,993,050		100,000,000			0.00%	0.00%	3.00	197,993,050	60.00%	17.22 %	BPBD	
	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	160	400,000,000	1.00	71,337,000		100,000,000			0.00%	0.00%	1.00	71,337,000	0.63%	17.83 %	BPBD	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			12,147,574,397		3,469,722,120		500,000,000		-	0.00 %	0.00%	0.00	3,469,722,120		28.56 %	BPBD	
	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	70	2,255,000,000	5.00	140,139,400		80,000,000			0.00%	0.00%	5.00	140,139,400	7.14%	6.21%	BPBD	
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	25	2,250,000,000	6.00	273,538,000		80,000,000			0.00%	0.00%	6.00	273,538,000	24.00%	12.16 %	BPBD	
	Kerjasama Antar Lembaga Dan kemitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	160	2,400,000,000	3.00	147,445,000		80,000,000			0.00%	0.00%	3.00	147,445,000	1.88%	6.14%	BPBD	
	Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	220	4,987,574,397	88.00	2,800,501,447		130,000,000			0.00%	0.00%	88.00	2,800,501,447	40.00%	56.15 %	BPBD	



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
2	3	4	4		5		6		7		8		9		10			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	70	255,000,000	5.00	108,098,273		130,000,000			0.00%	0.00%	5.00	108,098,273	7.14%	42.39 %	BPBD	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			17,000,000,000		4,417,100,005		3,527,541,280		-				4,417,100,005				
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			9,000,000,000		2,342,362,607		1,613,336,280		-				2,342,362,607				
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	60	3,250,000,000	14.00	813,444,440		525,000,000			0.00%	0.00%	14.00	813,444,440	23.33%	25.03 %	BPBD	
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran Manusia / Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	60	1,250,000,000	14.00	237,255,000		150,000,000			0.00%	0.00%	14.00	237,255,000	23.33%	18.98 %	BPBD	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	350	2,250,000,000	124.00	769,650,060		600,729,000			0.00%	0.00%	124.00	769,650,060	35.43%	34.21 %	BPBD	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan	50	1,250,000,000	10.00	223,166,216		137,607,280			0.00%	0.00%	10.00	223,166,216	20.00%	17.85 %	BPBD	



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
2	3	4	4		5		6		7		8		9		10			
			5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		dan Penanggulangan Kebakaran																
	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, Dan Kemitraan Dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	35	1,000,000,000	7.00	298,846,891		200,000,000			0.00%	0.00%	7.00	298,846,891	20.00%	29.88 %	BPBD	
	Investigasi Kejadian Kebakaran			250,000,000		100,000,000		-		-				100,000,000				
	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Kejadian Kebakaran yang di teliti dan diuji	5	250,000,000	2	100,000,000	-	-	-	-	0.00%	0.00%	2.00	100,000,000	40.00%	40.00 %	BPBD	
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran			6,500,000,000		1,583,427,370		1,764,205,000	-	-				1,583,427,370				
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	35	1,500,000,000	6.00	282,787,000		200,000,000			0.00%	0.00%	6.00	282,787,000	17.14%	18.85 %	BPBD	



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun 2022 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2023(Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2023 (%)		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
2	3	4	4		5		6		7		8		9		10			
			5		6		7		12=8+9+10+11		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	35	1,750,000,000	4.00	277,420,000		324,205,000			0.00%	0.00%	4.00	277,420,000	11.43%	15.85 %	BPBD	
	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	200	3,250,000,000	25.00	1,023,220,370		1,240,000,000			0.00%	0.00%	25.00	1,023,220,370	12.50%	31.48 %	BPBD	
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			1,250,000,000		391,310,028		150,000,000	-	-				391,310,028				
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	1,500	1,250,000,000	380.00	391,310,028		150,000,000			0.00%	0.00%	380.00	391,310,028	25.33%	31.30 %	BPBD	
				148,672,902,464		56,045,751,294		34,761,442,482		-				58,243,069,244				

2.2. Analisis Kinerja pelayanan OPD

Dalam Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah merumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terarah, terpadu dan menyeluruh adalah sebagai berikut :



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

Tabel. T-C.30.

Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA PD				REALISASI CAPAIAN			PROYEKSI		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana		Indeks Kualitas Pelayanan Informasi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana	77,50	78	78,90	79,50	77,50	78	78,90	79,50	81	
	Optimalnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	5,11%	8,11%	100%	100%	5,11%	3,00%	12,11%	15,11%	15,11%	
	Optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	8,55%	10,55%	100%	100%	5,55%	10,55%	13,55%	16,55%	16,55%	
	Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Optimalnya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencan di daerah	-	2	2	2	-	2	2	2	2	



2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah rawan akan bencana, hal ini dikarenakan topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam. kondisi ini semakin membahayakan jika praktek-praktek sistem pengelolaan sumber daya alam yang tidak seimbang, terkendali dan kurang memperhitungkan faktor lingkungan. Terkait dengan hal ini diperlukan peran yang sangat strategis dalam penanganan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya dapat bekerja secara professional untuk keamanan masyarakat dari bencana yang akan terjadi di Kutai Kartanegara. Profesionalisme sangat dibutuhkan dalam penanganan penanggulangan bencana di daerah karena yang akan merasakan dampak dari penanganan penanggulangan bencana di daerah Kutai Kartanegara nanti adalah seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Salah satu sumber daya yang sangat penting dalam penanganan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah partisipasi masyarakat, agar partisipasi masyarakat dapat tercurah secara terarah, terkoordinasi dan terkonsolidasi secara efektif maka partisipasi masyarakat perlu dikelola secara tepat.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih dirasa belum memadai. Keberadaan kantor yang masih belum representatif untuk penyelenggaraan organisasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana. Kondisi ini menjadi kendala internal organisasi.

Terlepas dari kondisi sarana dan prasarana masih terdapat kelemahan dalam kapasitasnya di sumber daya aparatur terkait dengan kuantitas dan kualitas. Jumlah sumber daya aparatur yang terbatas menjadikan kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam operasional organisasi dan penanganan bencana di daerah. Selama proses penyelenggaraan organisasi masih belum tersedia sistem ketatalaksanaan yang optimal. Meskipun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih berpedoman dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.



Terdapat pula beberapa hal terkait dengan rawan bencana yang terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara seperti intensitas bencana yang cukup tinggi yang didasari oleh kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagaimana diketahui bahwa konservasi sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali menjadi hal yang bertolak belakang. Meski memberikan keuntungan ekonomi yang besar namun ternyata eksplorasi telah mengubah derajat kualitas sumber daya alam. Dampak langsung kegiatan pertambangan diantaranya kerusakan ekologis seperti berkurangnya debit air sungai dan tanah, pencemaran air laut, dan kerusakan hutan hingga sedimentasi tanah. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian khusus dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga dapat meminimalisasi resiko bencana baik secara langsung atau tidak langsung ke masyarakat.

Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah:

a. Di aspek kebijakan Penanggulangan Bencana:

1. Belum adanya landasan hukum berkait penanggulangan bencana yang komprehensif di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif ke pendekatan preventif.
3. Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan padahal hampir semua daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara rentan bencana.
4. Penanggulangan Bencana masih bersifat sektoral dan kondisional, perlu sinkronisasi program dan kegiatan berkait pengurangan resiko bencana.

b. Dalam aspek Kelembagaan

1. Belum lengkapnya unsur kelembagaan yaitu unsur pengarah.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah relatif baru berdiri beberapa tahun, sehingga masih banyak belajar untuk melaksanakan penanggulangan bencana secara ideal.



3. Belum adanya aspek-aspek penunjang kelembagaan seperti : PUSDALOPS, TRC, dll
4. Fungsi Penanggulangan Bencana yang berpindah dari BPBD kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

c. Dalam aspek Ketugasan:

1. Upaya Penanggulangan Bencana masih disikapi dengan cara yang sama dengan ketugasan lain, tidak ada perkecualian.
2. Bencana yang datang tidak terduga, sehingga harus melaksanakan fungsi kesiap-siagaan dan respon time serta tanggap darurat yang mumpuni.
3. Paradigma penanganan bencana yang masih cenderung bersifat responsive sehingga menimbulkan dampak yang besar.
4. Masih minimnya relawan siaga bencana.
5. Rehabilitasi dan rekonstruksi yang sekiranya akan membutuhkan biaya yang cukup besar.
6. Belum ada dukungan sumber daya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, personil.
7. Laporan Data kebencanaan yang masih belum mutakhir dan terstandar , sehingga menyulitkan proses tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir Renja

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu penyesuaian terhadap RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikarenakan terdapat kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan Akhir RKPD dan Pagu Anggaran OPD, perlu disesuaikan dengan kebutuhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.



**RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025**

Tabel Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025 sebagai berikut :



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

Tabel. T-C.31.
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Nama Perangkat Daerah : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

RANCANGAN AKHIR RKPD									HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.415.591.573	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.415.591.573
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah		8.665.591.573	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)		8.665.591.573
1	05	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		225.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				225.000.000
1	05	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	100.000.000
1	05	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	75.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	75.000.000
1	05	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	50.000.000
1	05	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.350.875.098	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.350.875.098
1	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	700 Orang/bulan	4.130.875.098	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	700 Orang/bulan	4.130.875.098
1	05	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	40.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	40.000.000



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
1	05	01	2,0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24 Laporan	180.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24 Laporan	180.000.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		-
1	05	01	2,0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-
1	05	01	2,0 3	04	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	6 Laporan	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	-
1	05	01	2,0 3	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	-	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	-
1	05	01	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				150.000.000
1	05	01	2,0 5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	100 Orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	100 Orang	-
1	05	01	2,0 5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	10 Orang	75.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	10 Orang	75.000.000
1	05	01	2,0 5	10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	3 Orang	75.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Tenggarong	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	3 Orang	75.000.000



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	-	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	-
1	05	01	2,05	11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	240 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tenggarong	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	240 Paket	-
1	05	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				437.750.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				437.750.000
1	05	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah paket komponen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	5.250.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong	Jumlah paket komponen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	5.250.000
1	05	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	55.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	55.000.000
1	05	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tenggarong	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	32.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tenggarong	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	32.500.000
1	05	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	50.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	50.000.000
1	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	42.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	42.500.000
1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	165.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	165.000.000
1	05	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000
1	05	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	37.500.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	37.500.000
1	05	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.054.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.054.000.000



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
1	05	01	2,07	11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	500.000.000
1	05	01	2,07	12	Pengadaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	45.000.000	Pengadaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	45.000.000
1	05	01	2,07	13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	120 Unit	250.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	120 Unit	250.000.000
1	05	01	2,07	14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	259.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	259.000.000
1	05	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.077.966.475	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.077.966.475
1	05	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	3.750.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50 Laporan	3.750.000
1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	129.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah laporan penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	129.000.000
1	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.945.216.475	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	1.945.216.475
1	05	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				370.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				370.000.000
1	05	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	66 Unit	325.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	66 Unit	325.000.000
1	05	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	50 Unit	-	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	50 Unit	-
1	05	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Unit	45.000.000	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Unit	45.000.000



**RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025**

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				2.750.000.000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				2.750.000.000	
1	05	03	2,01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				150.000.000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				150.000.000	
1	05	03	2,01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	150 Orang	150.000.000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	150 Orang	150.000.000	
1	05	03	2,01	03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	-	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	-	
1	05	03	2,02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				550.000.000	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				550.000.000	
1	05	03	2,02	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	100 Unit	-	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	100 Unit	-	



**RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025**

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	
1	05	03	2,0 2	18	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	500 Orang	150.000.000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	500 Orang	150.000.000	
1	05	03	2,0 2	19	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarga	-	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10 Keluarg a	-	
1	05	03	2,0 2	20	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan	200.000.000	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasa n	200.000.000	
1	05	03	2,0 2	21	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan Akhir darurat bencana	25 Orang		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan Akhir darurat bencana	25 Orang		
1	05	03	2,0 2	22	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokume n	200.000.000	



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	
1	05	03	2,0 2	26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2 laporan		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	2 laporan		
1	05	03	2,0 2	28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	3 Kawasan		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	3 Kawasan		
1	05	03	2,0 3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	1.200.000.000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	1.200.000.000	
1	05	03	2,0 3	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	150.000.000	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	150.000.000	
1	05	03	2,0 3	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	150.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	150.000.000	
1	05	03	2,0 3	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20.792 Orang	450.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20.792 Orang	450.000.000	
1	05	03	2,0 3	07	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	1 Dokumen	-	
1	05	03	2,0 3	08	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan	25 Orang	-	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan	25 Orang	-	



**RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025**

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif
							darurat dalam aspek manajerial dan teknis					darurat dalam aspek manajerial dan teknis		
1	05	03	2,03	09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	273 Orang	250.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	273 Orang	250.000.000
1	05	03	2,03	10	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3 Laporan	100.000.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3 Laporan	100.000.000
1	05	03	2,03	11	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Kutai Kartanegara	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	100.000.000	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Kab. Kutai Kartanegara	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	100.000.000
1	05	03	2,04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				850.000.000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				850.000.000
1	05	03	2,04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	100.000.000	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	1 Dokumen	100.000.000
1	05	03	2,04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	100.000.000	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	100.000.000
1	05	03	2,04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	150.000.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen	150.000.000
1	05	03	2,04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	10 Laporan	300.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	10 Laporan	300.000.000
1	05	03	2,04	07	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana vana memiliki kompetensi	10 Orang	-	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana vana memiliki kompetensi	10 Orang	-



**RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025**

RANCANGAN AKHIR RKPD										HASIL ANALISA KEBUTUHAN					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Pagu Indikatif	
1	05	03	2,04	08	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	15 Orang	-	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	15 Orang	-	
1	05	03	2,04	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	10 Kegiatan	100.000.000	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	10 Kegiatan	100.000.000	
1	05	03	2,04	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	10 Laporan	-	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	10 Laporan	-	
1	05	03	2,04	14	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	100.000.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	100.000.000	
1	05	03	2,04	16	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	-	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	-	
					Jumlah				11.415.591.573		Jumlah				11.415.591.573



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pembangunan sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengambil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses Musrenbang. Musrenbang adalah forum dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi mereka, di situ ada proses timbal balik dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan adalah tentang bagaimana yang seharusnya dilakukan pemerintah serta sebaliknya yang harus dilakukan masyarakat dalam pembangunan yang akan dilaksanakan. Musrenbang adalah proses memajukan setiap daerah mulai dari Desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga pusat.

Perencanaan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat tidak akan berhasil tanpa peran serta masyarakat didalam pembuatan perencanaan tersebut. Menyadari akan pentingnya peran serta masyarakat, pemerintah mengharuskan didalam pembuatan perencanaan pembangunan baik pusat maupun daerah dilakukan musyawarah secara berjenjang dari tingkat bawah. Proses tersebut diakhiri dengan Musrenbang desa, Musrenbang kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Provinsi dengan tujuan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang.

Musrenbang RKPD Kutai Kartanegara digelar dalam rangka menyelaraskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan daerah provinsi, selain untuk mempertajam indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah kabupaten, serta guna menyepakati prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah serta pendanaannya. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan atau **masyarakat tahun 2025** hasil dari Musrenbang Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyepakati usulan Kegiatan dari Kecamatan yaitu :

Tabel. T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Kode	Usulan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	INDIKATOR KINERJA		Target (Volume dan Satuan)	Lokasi	Kebutuhan Dana (Rp)	KET	STATUS	ALASAN PERSETUJUAN
			Outcome	Output			APBD Kab/Kota			
BIDANG MUSRENBANG : PELAYANAN PUBLIK										
	1.05.04.2.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1,025,000,000			
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran					1,025,000,000			
	1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Kelompok /Relawan Pemadam Kebakaran	7 Kelompok Relawan		350,000,000			
		Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran / BALAKARCANA Kelurahan Sanga-Sanga Muara			15 orang	SANGA-SANGA	50,000,000		Disetujui	
		Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran / BALAKARCANA Desa Sebulu Ilir			15 orang	SEBULU	50,000,000		Disetujui	
		Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran / BALAKARCANA Kelurahan Ambarawang Darat			15 orang	SAMBOJA	50,000,000		Disetujui	
		Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran / BALAKRCANA Desa Bangun Rejo			15 orang	TENGGARONG SEBERANG	50,000,000		Disetujui	
		Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran / BALAKARCANA Desa Tanjung Batu			15 orang	MUARA MUNTAI	50,000,000		Disetujui	
		Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran / BALAKARCANA Desa Makarti			15 orang	MARANG KAYU	50,000,000		Disetujui	
		Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran / BALAKARCANA Desa Sidomulyo			15 orang	ANGGANA	50,000,000		Disetujui	
	1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat / Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana	Tersediannya Sarana dan Prasarana Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran	9 paket		675,000,000			
		Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Desa Muara Kaman Ulu			1 paket	MUARA KAMAN	75,000,000		Disetujui	
		Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Desa Melintang			1 paket	MUARA WIS	75,000,000		Disetujui	



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

		Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Desa RT. 01 Kembang Janggut			1 paket	KEMBANG JANGGUT	75,000,000		Disetujui	
		Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Kelurahan Sanga-sanga Muara			1 paket	SANGA-SANGA	75,000,000		Disetujui	
		Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Desa Muara Pantuan			1 paket	ANGGANA	75,000,000		Disetujui	
		Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Desa Jembayan Tengah			1 paket	LOA KULU	75,000,000		Disetujui	
		Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Desa Jantur Selatan			1 paket	MUARA MUNTAL	75,000,000		Disetujui	
		Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Desa Muara Belinau			1 paket	TABANG	75,000,000		Disetujui	
		Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Desa Kahala Ilir			1 paket	KENOHAN	75,000,000		Disetujui	
Jumlah Total							1,025,000,000			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Semangat Undang Undang Dasar 1945 memberikan amanat melalui pembangunan di bidang penanggulangan bencana bahwa bangsa Indonesia secara bersama-sama dan partisipatif diarahkan untuk senantiasa siap sedia dalam menghadapi potensi bencana yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, visi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai pemegang mandat pembangunan di bidang ini adalah: Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana.

Dengan peran dan tanggung jawab yang diembankan oleh Undang-undang nomor 24 tahun 2007 maka BNPB harus mampu mengoptimalkan peran koordinasi penanggulangan bencana dipusat dan daerah. Selain itu BNPB akan terus mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesuai kondisi faktual lingkungan strategis upaya penanggulangan bencana, baik yang menyangkut kondisi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta kemampuan untuk mewujudkan visi **Ketangguhan Bangsa Dalam Menghadapi Bencana** secara sistematis dan bertahap yang menuntut adanya kesiapan dalam menghadapi potensi bencana serta kemampuan untuk menanggulangi bencana pada saat maupun setelahnya. Untuk itu, misi BNPB dirumuskan sebagai berikut :

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui pengurangan risiko bencana;
2. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Upaya pencapaian misi pembangunan tersebut diperlukan suatu kerjasama yang sinergis antar kementerian, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah **daerah**, serta masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan dalam BNPB sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan.



Menindaklanjuti kebijakan Nasional Bidang Penanggulangan Bencana dengan melakukan evaluasi pelaksanaan visi, misi dan tupoksi organisasi yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan dan rencana aksi yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi serta melakukan peningkatan pelayanan strategik meliputi kesiapsiagaan, kedaruratan dan rehabilitasi serta rekontruksi terhadap penanggulangan bencana dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Alternatif strategi yang disajikan di atas selanjutnya dipilih untuk ditetapkan menjadi strategi jangka menengah BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Strategi ini diharapkan mampu memberikan arah yang jelas bagi upaya-upaya yang diambil untuk mencapai sasaran jangka menengah BPBD. Pilihan strategi ini juga menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang tepat.

Tabel. 5

**Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah BPBD Kabupaten Kutai
Kartanegara 2021-2026**

STRATEGI	KEBIJAKAN
A. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan 1. Meningkatkan inisiatif dan kapasitas penyusunan Peraturan Penanggulangan Bencana 2. Pembentukan dan Pemberdayaan Forum Pengurangan Risiko Bencana 3. Penyusunan Peraturan Penyebaran Informasi Kebencanaan 4. Implementasi Tataruang Berbasis Pengurangan Risiko Bencana 5. Meningkatkan Komitmen DPRD Terhadap Pengurangan Risiko Bencana dengan arah kebijakan	Mengarahkan pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan meninternalisasikan peraturan Penanggulangan Bencana kedalam Kebijakan pembangunan lainnya
B. Meningkatkan Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 1. Menyusun dan Mengimplementasikan Peta Penanggulangan Bencana 2. Evaluasi dan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Memperkuat Pendanaan Terhadap Dokumen Perencanaan

STRATEGI	KEBIJAKAN
C. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik 1. Perkuatan Sarana Penyampaian Informasi Kebencanaan Kepada Masyarakat 2. Sosialisasi pencegahan kesiapsiagaan bencana pada tingkat kecamatan 3. Meningkatkan komunikasi bencana lintas lembaga, pemerintah, masyarakat dan dunia usaha 4. Meningkatkan peran dan fungsi PUSDALOPS 5. Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan Penanggulangan Bencana 6. Melaksanakan kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan 7. Meningkatkan manajemen pergudangan logistik penanggulangan bencana 8. Meningkatkan ketersediaan sandang, pangan dan sumber energi untuk darurat	Perkuatan pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional
D. Meningkatkan penanganan tematik kawasan rawan bencana 1. Meningkatkan Penataan Ruang Berbasis PRB 2. Meningkatkan Kapasitas Rumah Sakit, sekolah, Madrasah dan Fasilitas Pelayanan Publik Lainnya Aman Bencana 3. Meningkatkan Kapasitas Desa Tangguh Bencana	Mengarahkan Keterlibatan Pemangku Kepentingan dalam PRB
E. Peningkatan efektivitas pencegahan 1. Rehabilitasi Tanggul, Embung, Waduk dan Taman	
F. Pengembangan system pemulihan bencana 1. Meningkatkan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur dan Pelayanan Publik pemerintah, Rumah Penduduk dan Penghidupan Masyarakat	
G. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan bencana 1. Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana 2. Peningkatan Sistem Peringatan Dini	Melibatkan Masyarakat dalam Proses Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana



STRATEGI	KEBIJAKAN
3. Perkuatan Infrastruktur Evakuasi Bencana	
4. Penerapan Sistem Komando Operasi Darurat	
5. Meningkatkan Kapasitas Perbaikan Darurat	

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanggulangan Bencana. Tangguh, dimaknai sebagai kemampuan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mampu melenting dari keterpurukan akibat bencana ke arah pembangunan yang lebih baik. Tujuan tersebut bermuara kepada upaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan perilaku saat bencana. Serta peningkatan kapasitas dalam rangka menciptakan sistem penanggulangan bencana yang handal.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan sasaran sebagai berikut:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Penanganan Bencana

maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah:

Misi 1 : Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal di Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Tujuan 1: Meningkatkan Kerjasama pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana, dengan sasaran:
- Meningkatnya sarana berupa perlengkapan dan peralatan Damkar;
 - Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur yang bersertifikasi;
 - Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, kapasitas dan ketrampilan unsur pendidik dan pelajar untuk mengantisipasi ancaman bencana.
- Tujuan 2: Meningkatkan pencegahan ,pengurangan resiko bencana, peringatan dini dan mitigasi dalam menghadapi ancaman bencana, dengan sasaran:
- Ketersediaan Data/Informasi Kebencanaan;
 - Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - Meningkatnya pengendalian operasional penanggulangan bencana di Kab. Kutai Kartanegara;
 - Mengurangi resiko kebakaran dengan revisi/rehabilitasi instalasi listrik;
 - Jenis Potensi Bencana.
- Misi 2 : *Meningkatkan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pengurusan pengungsi serta pemulihan sarana dan prasarana.*
- Tujuan : Meningkatkan Upaya Tanggap Darurat Bencana, dengan sasaran:
- Meningkatnya efektifitas penanganan kedaruratan bencana;
 - Ketersediaan kebutuhan masyarakat pada saat terjadi bencana.
- Misi 3 : *Meningkatkan upaya perbaikan, pemulihan semua aspek pelayanan publik dan pembangunan kembali prasarana, sarana kelembagaan pemerintahan/masyarakat pada wilayah pascabencana.*



- Tujuan 1: Percepatan pemulihan kondisi kehidupan masyarakat (kedaruratan, rehabilitasi dan rekontruksi) pada wilayah pasca bencana, dengan sasaran:
- Berfungsinya kembali sarana/prasarana (fasilitas umum) dan rumah masyarakat yang rusak akibat bencana;
 - Terbangunnya hunian sementara bagi korban bencana;
 - Meningkatnya penanganan keadaan darurat secara cepat dan tepat.
- Tujuan 2: Meningkatkan Kapasitas Pelayanan SKPD Penanggulangan Bencana Daerah, dengan sasaran:
- Meningkatnya Peraturan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran di SKPD Penanggulangan Bencana Kab. Kutai Kartanegara;
 - Meningkatnya Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur SKPD Penanggulangan Bencana Daerah;
 - Meningkatnya kapasitas Sumberdaya Aparatur;
 - Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Instansi.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Rencana Kerja OPD hendaknya selaras dengan isu-isu strategis dan tema pembangunan, baik di level Kabupaten, Provinsi, maupun Pemerintah Pusat. Begitu halnya dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara harus menyusun Rancangan Rencana Kerja untuk mengatasi berbagai masalah. Selain itu, Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara harus dilaksanakan sesuai Rencana Aksi Penanggulangan Bencana, baik Nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur.

Terkait dengan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki 2 (dua) program utama dan sebagai wujud dari tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Apabila program di setiap sasaran yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan seluruhnya pada tahun yang bersangkutan, maka program dalam rencana strategis dapat ditindaklanjuti dengan memasukkannya ke dalam rencana kinerja. Jika program tidak dapat dilaksanakan seluruhnya di dalam tahun yang bersamaan, maka dapat ditempuh alternatif lain, yakni dengan membuat skala prioritas terhadap program yang akan dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan kondisi yang lebih mendukung di tahun tersebut

Target kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum adalah berupaya Mewujudkan Ketangguhan Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Menghadapi Bencana. Target tersebut selaras dengan tema pembangunan 2021-2026 yaitu : *“Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia”*. Selain itu target kinerja yang nantinya berwujud rencana kerja dan kegiatan, selaras dengan perkembangan berbagai permasalahan yang berkembang berkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara. Permasalahan tersebut adalah:



- 1) Tingginya perhatian terhadap bencana, berikut upaya penanggulangannya dalam rangka menciptakan ketangguhan masyarakat terutama ketangguhan di sektor ketahanan ekonomi.
- 2) Masih banyaknya kerusakan dan kerugian akibat bencana di tahun sebelumnya yang belum di rehabilitasi dan rekonstruksi sehingga mengganggu kehidupan dan penghidupan.
- 3) Pertumbuhan Kabupaten Kutai Kartanegara yang akan mengakibatkan tumbuhnya pembangunan, hal tersebut harus mengindahkan upaya pengurangan resiko bencana.
- 4) Semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk dilindungi dari ancaman bencana, ditandai dengan tingginya semangat dan partisipasi dari masyarakat untuk aktif terlibat dalam upaya penanggulangan bencana.
- 5) Kejadian bencana bisa datang setiap saat dan menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, dan dimungkinkan menguras sumber daya yang besar.
- 6) BPBD selain menghadapi bencana Reguler di Kabupaten Kutai Kartanegara (Banjir, Karhutla, Tanah longsor, angin puting beliung, dsb), BPBD masih memiliki Pekerjaan Rumah tentang upaya pengurangan resiko bencana yang selama ini luput dari perhatian, sehingga dipastikan akan banyak menguras sumber daya yang ada.
- 7) Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya sarana prasana, dan sumber daya biaya sehingga membuat tugas operasional menjadi terhambat.

Sementara yang dimaksud dengan kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Hasil Pemetaan terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun anggaran 2025 sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sebagai berikut :



**RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025**

**Tabel. T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025
Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 (Rancangan Akhir)
Kabupaten Kutai Kartanegara**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			33.063.248.554					34.912.726.714	
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah		27.663.248.554					29.412.726.714	
1	05	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah		573.000.000					500.000.000	
1	05	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	270.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		7 Dokumen	250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	153.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		12 Laporan	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 Laporan	150.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Laporan	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.672.643.329					14.365.510.239	
1	05	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	700 Orang/bulan	13.171.643.329	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Orang/Bulan	13.874.510.239	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



**RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	05	01	2,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	86.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	86.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24 Laporan	360.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		24 Laporan	360.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	6 laporan	55.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6 laporan	45.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			250.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		6 Laporan	250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,03	04	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	6 Laporan	100.000.000					100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	150.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		50 Orang	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			870.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		15 Orang	825.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	100 Orang	75.000.000					75.000.000	



**RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	05	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	150.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10 Paket	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,05	10	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang	150.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Paket	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5 Dokumen	75.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Paket	75.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,05	11	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	240 Paket	420.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Paket	375.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.005.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		30 Laporan	1.175.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10 Paket	25.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	10.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,06	02	Penyediaan Bahan Materil	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	100.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	155.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	110.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10 Dokumen	155.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket komponen Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	65.000.000					155.000.000	



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	05	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	105.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Unit	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	12 Paket	85.000.000					100.000.000	
1	05	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	365.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Laporan	350.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	75.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Laporan	75.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	75.000.000					75.000.000	
1	05	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			7.311.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		66 Unit	8.104.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,07	11	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>	5 Unit	3.700.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		5 Unit	2.250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Pengadaan Mebel	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	2 Unit	225.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 Unit	445.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	60 Unit	2.600.000.000	Tenggarong	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		90 Unit	3.150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	100 Unit	786.000.000				120 unit	2.259.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	05	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.252.716.475	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		150 Orang	2.252.716.475	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	50 Laporan	7.500.000					7.500.000	
1	05	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		150 Orang	300.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	1.945.216.475	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	1.945.216.475	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.728.888.750	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Unit	1.940.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	66 Unit	1.463.888.750	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Kawasan	1.650.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	50 Unit	90.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			205.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	3 Unit	175.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	85.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			5.400.000.000					5.500.000.000	
1	05	03	2,01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			600.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Laporan	450.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	05	03	2,01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	150 Orang	350.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,01	03	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	250.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		20.792 Orang	300.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1.650.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		273 Orang	1.500.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,02	15	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	<i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya</i>	100 Unit	175.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		3 Laporan	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,02	18	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	<i>Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi</i>	500 Orang	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



**RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
						<i>penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota</i>								
1	05	03	2,02	19	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam</i>	10 Keluarga	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		10 Keluarga	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,02	20	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	<i>Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana</i>	3 Kawasan	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4 Kawasan	200.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,02	21	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan Akhir darurat bencana</i>	25 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		2 Dokumen	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,02	22	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	1 Dokumen	400.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		4 Dokumen	250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,02	26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang</i>	2 laporan	125.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		1 Dokumen	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
						<i>sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya</i>								
1	05	03	2,02	28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>	75 orang	350.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		350 orang	350.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	1.950.000.000					2.200.000.000	
1	05	03	2,03	01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	150.000.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2 Dokumen	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		60 Laporan	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	20.792 Orang	500.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	750.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,03	07	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal</i>	1 Dokumen	200.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		75 Unit	250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,03	08	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam	<i>Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang</i>	25 Orang	300.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		25 Orang	350.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
					penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	<i>memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis</i>								
1	05	03	2,03	09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	273 Orang	450.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		4 Dokumen	250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,03	10	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3 Laporan	100.000.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		3 Laporan	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,03	11	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		100 Orang	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			1.200.000.000					1.350.000.000	
1	05	03	2,04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah</i>	1 Dokumen	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,04	03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana</i>	2 Dokumen	100.000.000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	<i>Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia</i>	1 Dokumen	125.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	05	03	2,04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	<i>Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>	10 Laporan	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10 Laporan	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,04	07	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi</i>	10 Orang	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10 Orang	250.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,04	08	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)</i>	15 Orang	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		15 Orang	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,04	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalikan</i>	10 Kegiatan	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10 Kegiatan	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,04	12	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	<i>Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana</i>	10 Laporan	125.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		10 Laporan	100.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2,04	14	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	2 Dokumen	100.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah



**RANCANGAN AKHIR RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah
							Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Catatan Penting	Target	Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	05	03	2,04	16	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	<i>Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>	1 Dokumen	150.000.000	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	150.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Proses penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah, mendorong upaya keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian

1. Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara masih dirasa belum memadai.
2. Keberadaan kantor yang masih belum representatif untuk penyelenggaraan organisasi dalam rangka penanganan dan penanggulangan bencana. Kondisi ini menjadi kendala internal organisasi.
3. Jumlah sumber daya aparatur bersertifikasi yang terbatas menjadikan kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam operasional organisasi dan penanganan bencana di daerah.
4. intensitas bencana yang cukup tinggi yang didasari oleh kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Pengurangan resiko bencana belum menjadi landasan dasar pembangunan padahal hampir semua daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara rentan bencana.

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan

Dalam Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Penanggulangan Bencana terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Jenis indikator yang dikaji serta ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah merumuskan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien, serta Pengkoordinasian Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Bencana secara terarah, terpadu dan menyeluruh.

c. Rencana tindak lanjut

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun berdasarkan program dan kegiatan pada bidang-bidang teknis dan usulan dari Hasil Musrenbang Kabupaten. Penyempurnaan matrik Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mewujudkan alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan rencana kinerja tahunan adalah *target setting* dari pencapaian indikator kinerja.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini disampaikan, sebagai acuan dan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan serta sebagai alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan, efisiensi belanja dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Tenggarong, 21 April 2024

Kepala Pelaksana,



SETIANTO NUGROHO AJI, SH, M.Si
Rencana Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671027 199403 1 008